

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kontrak yang dapat diterapkan dalam kontrak konstruksi yang sesuai dengan prinsip hukum kontrak, dan pihak-pihak yang bertanggung gugat atas jasa konstruksi apabila terjadi wanprestasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Masalah, dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*.

Hasil yang didapat adalah bahwa jenis kontrak yang diterapkan pada pemerintah daerah umumnya adalah jenis *Joint Operation*, yang lebih dikenal dengan kerjasama operasi. Pemerintah daerah selaku badan publik sebagai pemilik aset tidak dapat mengerjakan sendiri proyek pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga mengadakan kerjasama dengan perusahaan umum swasta sebagai pihak pelaksana pekerja pembangunan tersebut yang dibiayai oleh pemerintahn daerah selaku pemilik proyek.

Pihak yang bertanggung gugat dalam kontrak konstruksi adalah penyedia jasa konstruksi, karena pihak yang terikat dalam kontrak konstruksi adalah pemerintah dalam hal ini Pejabat pembuat Komitmen dengan penyedia jasa konstruksi sehingga kedua belah pihak terikat dalam perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) B.W.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama Operasional, Kontrak Konstruksi, bertanggung gugat

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the types of contracts that can be applied in the construction contract in accordance with the principles of contract law, and the parties accountable for construction services in the event of default. Type of study is a normative juridical. This one with statute approach and conceptual approach.

The results is the kind of contracts that apply to local governments generally are kind of Joint Operations, or operational cooperation. The local government as a public body as property owners can do their own project procurement, thus entered into a collaboration with a private company as the executive general construction workers, which is funded by the government is as the owner of the project area.

Parties accountable in the construction contract is a provider of construction services, as party to the construction contract is the government in this case the official manufacturer's commitment to the construction service providers so that both parties are bound under the agreement as binding law in accordance with article 1338 paragraph (1 ) BW

Keywords: Operational Cooperation Agreement, Contract Construction, accountable